



Membangun Budaya Membaca di Kota Gemilang

03



Menuai Untung di Lahan Tidur

Berbagai jenis tanaman terlihat memenuhi pekarangan rumah salah seorang anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Warga memanfaatkan lahan kosong termasuk lahan pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis tanaman dan tumbuhan.

06



Meretas Jalan Menuju Kota Ramah Anak

Namun Gampong ini menjadi yang terdepan dicanangkan sebagai gampong ramah anak di Banda Aceh. Saat ini Lampaloh tercatat sebagai gampong ramah anak kedua. Desa pertama yang diserahkan amanah untuk menjadi lebih ramah terhadap anak adalah Lamjabat.

07



Karena Guru Juga Perlu Motivasi

Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Saminan, berpesan. Dia meminta guru meningkatkan motivasi dalam mengajar. Hasrat mereka dalam mendidik sangat penting bagi keberhasilan program pendidikan.

◆◆◆ SALAM REDAKSI



Bustami
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Kota Banda Aceh

Mari Membaca

POJOK Baca berdiri di ruang tunggu Rumah Sakit Umum Meuraxa. Ini adalah salah satu sinyal penting dari keinginan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman untuk menumbuhkan minat baca warga kota. Di rumah sakit ini, sembari menunggu antrian, warga kota dapat menghabiskan waktu dengan lebih bermanfaat.

Urusan membaca, kita memang masih tertinggal. Apalagi jika dibandingkan dengan negara-negara maju. Indonesia sendiri berada di peringkat ke 60 dari 61 negara yang disurvei tentang minat baca.

Kebiasaan membaca di negara-negara maju bukan karena keharusan. Ini adalah budaya yang tumbuh dan mengakar. Membaca menjadi kebiasaan dan menjadi bagian dari keseharian mereka. Di sekolah-sekolah, digelar “Hari Membaca” untuk menumbuhkan minat anak-anak terhadap buku. Pojok-pojok baca juga tersedia di ruang-ruang publik. Buku yang tersedia juga cukup berkualitas.

Budaya membaca dimulai sejak anak-anak berusia dini. Dimulai saat mereka mulai mengerti arti kata. Orang tua meluangkan waktu membacakan cerita dari buku kepada anak-anak mereka sebelum tidur. Hal ini pun terbawa dan menjadi kebiasaan dengan berbagai fasilitas dan buku yang dengan mudah dapat diakses di perpustakaan-perpustakaan yang memiliki koleksi buku jutaan judul.

Budaya membaca akan sangat berpengaruh pada pembentukan karakter anak. Rendahnya peringkat minat baca anak di negeri ini, perlu perhatian bersama, seluruh elemen masyarakat, untuk mengubah hal ini. Membaca adalah kunci membangun peradaban bangsa. Membaca meluaskan wawasan dan cakrawala berpikir. Membaca juga mendorong kita untuk berpikir kritis serta kreatif. Semua bacaan akan menjadi referensi yang penting dalam membentuk karakter. Mungkin kini saatnya warga kota menyisihkan waktu untuk membaca buku. Mari membaca.

Agar Kota Ramah Anak

WALI Kota Banda Aceh Aminullah Usman mencanangkan langkah penting. Kota ini diproyeksikan untuk menjadi kota ramah anak. Langkah ini tidak hanya menjadi sebuah momentum untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota tempat tumbuh dan berkembangnya generasi islami. Langkah ini juga akan melengkapi sejumlah program lain untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota yang gemilang.

Kekerasan terhadap anak adalah musuh bersama. Gerakan ini memang bukan gerakan pertama yang dicetuskan di Indonesia. Ada banyak kota lain yang melakukan langkah ini. Namun di kota-kota itu pula kekerasan terhadap anak semakin marak. Terutama kekerasan fisik dan seksual. Kekerasan di kota-kota besar ini menular ke daerah lain.

Karenanya, wali kota tentu tak sekadar ingin program ini dilaksanakan hanya di atas kertas. Banda Aceh sendiri juga memiliki catatan tentang kasus kekerasan terhadap anak, meski urusan ini ditangani secara hukum. Kasus ini memperpanjang daftar kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Aceh.

Syahdan, di pantai timur Aceh, seorang ayah mengamuk. Pemicunya hanya karena si anak yang berusia enam tahun tak mau tidur siang. Kasus ini kemudian dilaporkan oleh ibu kandung korban ke kepolisian. Kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga oleh orang-orang terdekat memang kerap terjadi. Bahkan hal ini dilakukan tanpa disadari oleh pelaku. Di tengah sejumlah problematika sosial di Aceh, anak-anak menjadi berada di posisi yang sulit dan rentan menjadi korban.

Hal lain yang mungkin memicu kekerasan terhadap anak ini adalah perasaan kecewa melihat kondisi riil si anak. Banyak orang tua yang menomorsatukan anak dan menjadikan mereka segala-galanya. Saat si anak tak mampu memenuhi harapan orang tuanya, anak lantas dijadikan pelampiasan. Mereka dihukum atas harapan-harapan orang tua.

Penyiksaan ini, baik secara fisik maupun verbal, yang terjadi berulang dalam waktu yang panjang akan menimbulkan cedera serius di hati dan fisik anak. Mereka menjadi anak yang tertutup, tidak percaya diri dan sukar mempercayai orang lain. Mereka juga cenderung merusak karena merasa tidak dihargai dan selalu dicela.

Kerenanya, penting bagi semua pihak untuk bersikap lebih peduli dan membuka diri. Orang tua harus mau berkomunikasi dengan anak. Masyarakat perlu membangun kewaspadaan bersama agar anak-anak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari lingkungan. Para guru, tetangga, dan kerabat dekat harus memberikan perhatian.

Karena itu, langkah kota ramah anak harus dilakukan secara terukur. Terutama untuk membangun kesadaran agar warga melaporkan kasus kekerasan kepada anak kepada pemerintah atau aparat kepolisian. Perubahan stigma ini penting karena daerah ini juga lama dirundung kekerasan saat konflik. Dahulu kekerasan tidak dianggap sebagai pelanggaran, namun seiring kesadaran masyarakat, pelaporan kasus-kasus semacam itu bermunculan.

Kekerasan terhadap anak yang terjadi selama ini menunjukkan lemahnya pemenuhan hak anak. Ada yang salah dalam kebijakan dan prioritas pembangunan. Ada banyak daerah yang berharap mendapatkan penghargaan, namun abai dalam membangun substansi perlindungan terhadap anak.

Seluruh elemen di Banda Aceh harus memahami bahwa selama ini anak kurang mendapat perhatian. Upaya melindungi anak belum menjadi gerakan yang mampu mendorong semua elemen melindungi anak. Pertama, sumber masalahnya adalah semenjak Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan mengeluarkan Permeneg PPPA No 13 Tahun 2011 tentang panduan pengembangan kabupaten/ kota layak anak, kabupaten/kota di Indonesia berlomba-lomba terpacu menjadi kabupaten/kota layak anak.

Untuk memicu upaya kabupaten/ kota, pemerintah menjadikan lomba antarkabupaten/kota dengan memberi predikat Pratama, Madya, Nindya, Utama dan KLA bagi kabupaten/ kota. Bagi sebuah kabupaten/ kota penghargaan lebih memberikan kebanggaan dan gengsi, tidak peduli masih banyak kekerasan pada anak.

Substansi pemberian penghargaan lebih untuk dikejar sebagai prestasi. Banyak kepala daerah lebih senang berangkat ke Jakarta pada hari anak nasional untuk menerima penghargaan, terlepas di daerahnya terdapat kekerasan, gizi buruk, kematian bayi, anak jalanan.

Kedua, dengan mengejar predikat kabupaten/kota layak anak justru upaya-upaya yang terkait dengan penanganan kekerasan kepada anak cenderung dilupakan. Mereka giat menjalankan berbagai kegiatan bertema anak seperti sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, desa ramah anak, festival anak, melibatkan anak dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang tujuannya memenuhi dokumen administrasi untuk diajukan dalam lomba, bukan untuk memenuhi hak anak.

Akibatnya upaya pencegahan kekerasan kepada anak nyaris kurang. Upaya pencegahan kekerasan pada anak dilakukan dengan memperkuat pengasuhan dalam keluarga tidak dilakukan. Gerakan membangun ketahanan keluarga diabaikan. Sayangnya, upaya memperkuat keluarga melalui program pengasuhan



Oleh: Mahdi Andela*

keluarga dan lingkungan alternatif agar berdaya tahan tidak dilakukan. Program parenting keluarga jika dilakukan tidak konsisten tidak berdampak pada kualitas keluarga. Ironis memang kabupaten/kota layak anak tetapi banyak anak tinggal di tengah keluarga dan masyarakat yang tidak layak anak.

Ketiga, anugerah kabupaten/kota layak anak masih mengandung kelemahan karena hanya mendorong kabupaten/kota meraih penghargaan tetapi tidak mendorong perlindungan anak. Kian maraknya kekerasan sudah saatnya menjadi bahan evaluasi para pihak agar substansi evaluasi dan pemberian penghargaan menyentuh pada upaya-upaya perlindungan anak.

Pemerintah mestinya tidak hanya menggelar lomba tetapi juga melihat aksi nyata kabupaten/kota terkait perlindungan anak. Semisal dengan reward and punishment jika terjadi kekerasan pada anak di kabupaten/ kota penerima penghargaan. Penghargaan tentu tidak dimaksudkan agar hak anak tidak terlindungi. Penghargaan adalah alat mengukur kabupaten/kota dalam menghormati, memenuhi dan melindungi hak anak.

Kita mungkin akan merasa malu sebagai warga kota layak anak ternyata masih menemui kasus kekerasan terhadap mereka. Dikhawatirkan banyak orang kian skeptis dengan predikat kabupaten/kota layak anak yang tidak semakin melindungi anak. Penghargaan diberikan untuk memicu daerah menekan kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Memenuhi hak anak merupakan upaya kompleks yang melibatkan banyak sektor secara terkoordinasi. Kota layak anak adalah upaya para pihak secara terintegrasi untuk mendukung dan memenuhi hak anak.

Anak-anak adalah anak-anak. Mereka bukan pria atau wanita dewasa berukuran kecil. Mereka adalah pribadi berbeda. Mereka hidup dalam pikiran sendiri yang tak dapat disamakan dengan pola pikiran dan kemampuan orang dewasa. Anak harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan. Keberadaan mereka jangan dianggap sekadar penghiburan dan pelengkap.

■ Penulis adalah Wakil Sekretaris Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Cabang Aceh, Pegawai di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh

◆◆◆ REDAKSI

PENERBIT Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh | **PEMBINA** Walikota Banda Aceh - Wakil Walikota Banda Aceh | **PENGARAH** Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh **PENANGGUNG JAWAB** Bustami | **WAKIL PENANGGUNG JAWAB** T. Taufik Mauliansyah | **DEWAN REDAKSI** Jailani - Rahmat Khadafi - Maulidar - Jauhari | **PEMIMPIN REDAKSI** H.T Anwar | **WAKIL PEMIMPIN REDAKSI/ REDAKTUR PELAKSANA** Mahdi Andela | **SEKRETARIS REDAKSI** Cut Ahmad Putra | **REPORTER** A. Sabur - Afrizal | **STAF REDAKSI** Azwar - Afifuddin - Teja Sukmajaya - Asna Mardhia – Izzan – Muharrami – Devi Irawan | **FOTOGRAFER** Ratno Sugito | **LAYOUTER** Mulyadi



Menuai Untung di Lahan Tidur

Warga kota didorong untuk memanfaatkan pekarangan rumah dan lahan tidur. Meningkatkan ekonomi dan bermanfaat secara ekologi.



Foto: Dok. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan Dan Perikanan Kota Banda Aceh

Pekarangan rumah salah seorang anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh.

Berbagai jenis tanaman terlihat memenuhi pekarangan rumah salah seorang anggota Kelompok Wanita Tani (KWT) di Gampong Emperom Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh. Warga memanfaatkan lahan kosong termasuk lahan pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis tanaman dan tumbuhan.

“Ada banyak hal yang bisa dilakukan di atas lahan kosong. Dan itu akan lebih bermanfaat dan mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya,” kata Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Banda Aceh Zulkifli Syahbuddin, Jumat lalu.

Karenanya, dalam beberapa bulan terakhir, Zulkifli dan dinas yang dikendalikannya rutin mengajak warga kota yang memiliki lahan kosong untuk memanfaatkan lahan tersebut. Termasuk lahan pekarangan rumah.

Warga, kata dia, dapat menanam tumbuhan yang produktif, seperti cabe atau sayuran lainnya.

Dengan demikian, lahan-lahan tidur dan pekarangan rumah dapat menjadi lebih asri dan terawat. Selain menambah keindahan kota, pemilik mendapatkan keuntungan tambahan dengan menjual hasil panen cabe atau tomat yang mereka tanam. Minimal, kata Zulkifli, dapat menghemat pengeluaran karena mengurangi pengeluaran untuk membeli bahan-bahan tersebut.

Selain itu pihaknya juga mengarahkan ibu rumah tangga agar memanfaatkan lahan di pekarangan ru-

mah untuk ditanami

pepohonan. Warga, kata dia, dapat menanam pohon-pohon buah yang dapat dinikmati sendiri atau memberikan keuntungan saat dijual.

“Mangga atau jambu dapat menjadi alternatif tanaman. Selain menjadikan rumah lebih teduh, buahnya juga dapat dinikmati sendiri. Kalau memang buahnya melimpah, dapat juga dijual. Kita tak pernah merugi saat menanam pohon,” kata Zulkifli. Menurut Zulkifli, untuk lahan

pertanian saat ini sedikit terbatas karena kawasan Banda Aceh ini tidak begitu luas. Memanfaatkan pekarangan dengan cermat dan cerdas, kata dia, bisa menjadi solusi, baik dari segi

ekonomis ataupun ekologis.

Diakui Zulkifli bahwa di Banda Aceh sendiri tidak pernah kekurangan pangan, seperti beras karena Banda Aceh merupakan pusat perekonomian dan menjadi ibu kota Aceh. Namun warga juga bisa memanfaatkan sisi lain yang selama ini belum dimanfaatkan secara maksimal dengan modal minim.

Tak hanya soal menanam pohon, Dinas PPKP juga aktif mengajak warga untuk lebih gemar mengonsumsi ikan. Dinas menggelar sejumlah perlombaan memasak ikan sehat. Ajang ini diikuti oleh semua kecamatan, sedangkan juaranya akan diperlombakan di tingkat provinsi. “Tidak hanya itu, kita juga aktif melakukan penyuluhan khususnya di bidang pertanian, perikanan di setiap kecamatan. Sementara kalau masalah perikanan kita tetap akan melakukan pembinaan hingga pengolahan hasil dan budidaya,” kata Zulkifli. **(A. Sabur)**



Zulkifli Syahbuddin
Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan,
dan Perikanan Kota Banda Aceh



T Iwan Kesuma
Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kota Banda Aceh

BANDA ACEH - Ada kabar gembira bagi pengusaha kecil dan menengah. Pemerintah Kota Banda Aceh, melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, menyiapkan sejumlah dukungan untuk membantu mereka mengembangkan usaha. Pada pemerintahan Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman ini, Dinas mengalokasikan dana besar untuk menjadikan pengusaha kecil dan menengah lebih berdaya saing.

“Mereka adalah penggerak roda perekonomian di Banda Aceh. Karenanya, pemerintah kota memberikan perhatian besar agar mereka tumbuh dan berkembang. Mampu bersaing dan dapat menciptakan produk-produk andalan,” kata Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh T Iwan Kesuma, akhir Oktober lalu.

Dikatakannya, animo pengusaha kecil untuk memanfaatkan bantuan ini sangat

Optimisme di Jantung UMKM Kota

besar. Mereka, kata dia, mengajukan proposal untuk mendapatkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha. Bahkan, kata T Iwan Kesuma, dinas kewalahan menyeleksi proposal yang masuk. Selain bagus, sebagian besar proposal itu sangat potensial untuk dikembangkan.

“Dana yang tersedia masih sangat terbatas. Namun yang membuat kami optimistis sektor ini akan semakin berkembang adalah melihat kreatifitas dan ide usaha serta model bisnis yang akan mereka kembangkan,” kata T Iwan Kesuma. “Dengan anggaran yang terbatas dan banyaknya proposal yang ada, kami harus lebih selektif dalam memilih kelompok binaannya.”

Menurut T Iwan Kesuma, hal ini adalah upaya memajukan perekonomian wiraswasta kota. Banyak pengusaha yang kesulitan mengakses pinjaman modal ke perbankan. Karenanya, T Iwan Kesuma berharap bantuan yang diberikan benar-benar dipergunakan untuk mengembangkan dan memajukan usaha. Bahkan, kata T Iwan Kesuma, usaha kecil dan menengah yang ada di Banda Aceh diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja. Dengan demikian, banyak keluarga yang akan mendapatkan manfaatnya.

Untuk dapat mengakses bantuan, kata T Iwan Kesuma, kelompok usaha masyarakat harus mengajukan permohonan modal usaha dengan dukungan pernyataan usaha dari keuchik dan camat. “Kami menggunakan skema kelompok usaha dalam mendistribusikan bantuan tersebut. Setiap kelompok dapat mengakses dana bantuan sebesar 20 sampai

dengan 200 juta per kelompok. Jumlah bantuan akan disesuaikan berdasarkan kebutuhan kelompok usaha tersebut,” kata T Iwan Kesuma.

Menurut pihaknya, untuk kelompok berkebutuhan khusus, sampai saat ini belum ada penyaluran bantuan. Ini dikarenakan belum ada permintaan yang masuk ke Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Banda Aceh. T Iwan Kesuma mengatakan pihaknya tetap memprioritaskan kelompok disabilitas untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Selain itu, Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kota Banda Aceh juga siap membantu promosi produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM maupun kelompok UMKM ke tingkat nasional bahkan Internasional melalui pameran-pameran yang dilakukan oleh Dinas maupun melalui Pemko Banda Aceh.

Dengan mengikuti kegiatan pameran-pameran diharapkan produk yang dihasilkan oleh UMKM dapat dikenal. Apalagi produk tersebut berkualitas. Sehingga dapat bersaing dan dikenal luas oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri. “Selanjutnya UMKM perlu juga kita ajak untuk dapat ikut dalam jejaring UMKM melalui media on line untuk memperkenalkan produk mereka,” kata T Iwan Kesuma.

Namun terlepas dari dukungan pemerintah, kata T Iwan Kesuma, produk yang dihasilkan UMKM harus benar-benar berkualitas dengan harga yang bersaing. Apalagi persaingan di sektor UMKM sangat sengit karena melibatkan banyak pemain. Baik di Aceh atau luar Aceh. Produk yang ditawarkan juga sangat beragam dengan kualitas yang baik. Inilah tantangan yang perlu ditaklukkan untuk mendapatkan tempat di hati konsumen.

“Kemasan harus baik dan bagus. Produk UMKM juga harus terjamin. Halalan tayyiban,” kata T Iwan Kesuma. Selain pasar online, pemerintah kota juga membangun dan merehabilitasi beberapa pasar di Banda Aceh untuk menampung pedagang-pedagang yang tidak tertampung di pasar yang ada. Menggunakan Dana Alokasi Khusus, pemerintah membangun kembali Pasar Kampung Baru, Pasar Baroh, Pasar Kartini dan Pasar Peniti. Penambahan bangunan baru dan revitalisasi pasar ini ditargetkan selesai akhir tahun ini dan dapat segera dimanfaatkan serta dinikmati pedagang dan pembeli. **(A. Sabur)**

Membangun Budaya Membaca di Kota Gemilang

RAK lima tingkat itu menjadi etalase deretan buku dengan berbagai judul. Mulai dari tulisan ringan hingga buku bertopik keagamaan dan pelaksanaan syariat Islam. Di hadapannya terdapat sebuah meja dan deretan kursi. Di sini, sejumlah orang terlihat asyik membaca.

“Kak, lihat ada yang bergambar tengkorak,” kata seorang anak kepada anak lain yang lebih tua. Anak-anak itu dengan mudah mengambil buku yang mereka suka dan membacanya di atas lantai yang dilapisi ambal cokelat tebal.

Mereka tak sedang bermain di perpustakaan. Suasana ini adalah pemandangan baru di ruang tunggu di Rumah Sakit Umum Meuraxa. Tempat ini dinamai Pojok Baca Gemilang. Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman dan Kepala Bank Indonesia Perwakilan Aceh Zainal Arifin Lubis yang meresmikan perpustakaan kecil ini, akhir Oktober lalu.

Peresmian Pojok Baca Gemilang ditandai dengan pemotongan pita oleh Aminullah dan Zainal Arifin Lubis. Sejumlah pemimpin bank di Aceh juga terlihat hadir. Peresmian juga disaksikan oleh Kepala Dinas Arsip dan Pustaka Aceh Wildan, Kepala Dinas Arsip dan Pustaka Banda Aceh Alimsyah, Direktur Utama RSU Meuraxa

Fuziati dan sejumlah pejabat lain.

Program ini merupakan kerja sama Pemerintah Kota dan Bank Indonesia. Sejumlah buku berasal dari Perpustakaan Nasional. Pojok Baca ini berdekatan dengan ruang pengambilan nomor antrean layanan kesehatan. Dengan demikian, mereka yang bosan menunggu dapat mengalihkan perhatian kepada buku-buku yang disediakan tersebut.

“Kita perlu menjadikan Banda Aceh sebagai kota literasi. Stigma bahwa masyarakat Banda Aceh malas membaca harus dapat kita ubah bersama-sama,” kata Aminullah. “Dengan membaca, wawasan kita akan bertambah. Bahkan surat Al-quran yang pertama turun adalah perintah membaca. ‘Iqra’.”

Aminullah memastikan bahwa pojok baca ini bukan yang terakhir. Dia berencana memanfaatkan ruang publik lain untuk diselipkan pojok baca. Program ini dilakukan dengan menggandeng pihak perbankan di Aceh. Aminullah mempersilakan pihak perbankan untuk berkontribusi. Pemerintah kota, kata dia, menyediakan ruangnya.

Aminullah berpendapat budaya membaca akan mendorong terwujudnya Banda Aceh sebagai kota gemilang dalam bingkai syariat Islam. Dengan meningkatnya pe-



“Kita perlu menjadikan Banda Aceh sebagai kota literasi. Stigma bahwa masyarakat Banda Aceh malas membaca harus dapat kita ubah bersama-sama.”

Aminullah Usman, SE.Ak, MM
Walikota Banda Aceh

ngetahuan, kata dia, akan muncul perubahan sikap yang lebih baik. Hal ini akan membantu upaya pemerintah kota dalam menguatkan akidah, akhlak, ibadah, muamalah dan syiar Islam serta misi pemerintah kota lainnya.

Langkah ini tentu saja harus dibarengi dengan langkah lain. Satu di antaranya adalah mengintensifkan keberadaan perpustakaan keliling yang dikelola oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh. Kendaraan-kendaraan yang membawa buku bacaan ini rutin mengunjungi sekolah-sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah di seluruh penjuru kota.

Sekolah-sekolah dasar, kata Aminullah, adalah tempat yang tepat menumbuhkan budaya membaca di tengah gempuran gawai yang semakin mudah mereka dapat. Menurut Aminullah, waktu anak-anak seharusnya lebih besar untuk meme-

gang buku ketimbang gadget.

Aminullah juga berharap agar budaya membaca juga tumbuh di kalangan pelajar lain di tingkat lebih tinggi, seperti pelajar sekolah menengah pertama dan atas atau sederajat. Aminullah berharap mereka mau menjadikan perpustakaan kota dan perpustakaan lain, seperti milik Pemerintah Aceh dan kampus-kampus sebagai tempat belajar dan berbagi. Di perpustakaan milik Banda Aceh, misalnya, pelajar dapat menjadikannya sebagai wahana belajar yang efektif.

“Tanggung jawab kita adalah mendidik mereka. Tentu saja perlu kerja sama. Saya juga berharap agar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh dalam menumbuhkembangkan minat dan budaya baca terhadap siswa-siswi, terutama di sekolah dasar, agar menjadi generasi emas,” kata Aminullah. (Afrizal)



Meretas Jalan menuju Kota Ramah Anak

Saya pikir jangan hanya satu gampong, tapi bisa sampai 10 hingga 15 gampong dalam setahun



Foto: Dok. Humas Setdako Banda Aceh
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman didampingi Ketua DPRK Banda Aceh Arif Fadillah dan Camat Lueng Bata Mustafa membuka selubung Gampong Ramah Anak Aneuk Mutuwah, Gampong Lampaloh kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh.

BANDA ACEH - Lampaloh merupakan gampong dengan wilayah terkecil di Banda Aceh. Ini adalah salah satu gampong padat penduduk yang terletak di Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh. Di desa ini, terdapat sejumlah pusat perekonomian yang menjadi salah satu “etalase” Banda Aceh.

Namun Gampong ini menjadi yang terdepan dicanangkan sebagai gampong ramah anak di Banda Aceh. Saat ini Lampaloh tercatat sebagai gampong ramah anak kedua. Desa pertama yang diserahkan amanah untuk menjadi lebih ramah terhadap anak adalah Lamjabat.

Pencanangan Lampaloh sebagai Gampong Ramah Anak dilakukan oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Bersama-sama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Arif Fadillah dan Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh Media Yulizar, Aminullah memukul rapai tanda dimulainya program ini.

“Saya pikir jangan hanya satu gampong, tapi bisa sampai 10 hingga 15 gampong dalam setahun,” kata Aminullah di sela-sela acara itu.

Menurut Aminullah, langkah menjadikan Banda Aceh sebagai kota ramah anak adalah sebuah kebutuhan. Banda Aceh adalah ibu kota yang menjadi tujuan banyak orang dari seluruh penjuru Aceh. Kota ini juga

banyak didatangi wisatawan, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Hal ini menyebabkan “benturan” kebudayaan yang tinggi.

Dalam hal ini, yang kerap menjadi korban adalah anak-anak. Mereka, kata Aminullah, berada dalam posisi yang rentan. Karena itu, pemerintah kota perlu mendorong agar seluruh lapisan masyarakat benar-benar memperhatikan dan peduli terhadap kenyamanan anak-anak.

“Masih ada anggapan di masyarakat bahwa anak-anak bukan bagian penting dalam kehidupan mereka. Padahal di pundak mereka kelaklah kota ini akan dibangun. Kita harus memastikan bahwa mereka mendapatkan hal yang baik dan yang terbaik dari lingkungan mereka. Bukan hanya perasaan aman, mereka juga harus merasa nyaman untuk tumbuh dan berkembang,” kata Aminullah.

Tak salah jika Aminullah mengapresiasi pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh. Dinas yang dipimpin oleh Media ini dinilainya bekerja keras menjadikan Lampaloh sebagai Gampong

Ramah Anak. Namun Aminullah berpesan agar peran baru gampong ini benar-benar dipahami oleh seluruh masyarakat.

Untuk mendukung Gampong Lampaloh sebagai Gampong Ramah Anak,

Aminullah mengatakan, pemerintah kota melakukan tahapan-tahapan dalam rangka pengembangan program tersebut. Di antaranya dengan sosialisasi Gampong Ramah Anak kepada masyarakat dan aparat gampong Lampaloh. Pemerintah kota juga membentuk gugus tugas gampong ramah anak Lampaloh, mensosialisasikan gerakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di Gampong Lampaloh, membentuk forum anak Gampong Lampaloh dan mendorong alokasi dana gampong yang tepat untuk memenuhi hak-hak anak.

“Insya Allah, forum anak ini akan dibentuk pada November,” kata Aminullah. Namun tak hanya Lampaloh yang menjadi fokus, Aminullah juga bertekad mengalokasikan dana dalam anggaran kota untuk membuka ruang publik yang lebih ramah terhadap anak. “Sekaligus menjadi pendorong pengembangan ekonomi masyarakat kota.”

Aminullah juga berharap tanggung jawab ini dapat dipikul bersama oleh seluruh warga kota, sesuai dengan peran mereka masing-masing. Misalnya, kata Aminullah, seorang guru. Mereka dituntut untuk membentuk karakter anak ke arah yang lebih baik. Pada kegiatan yang digelar di pekarangan Meunasah Gampong Lampaloh itu, juga ditampilkan sejumlah penampilan kesenian yang dimainkan anak-anak Lampaloh. Ada juga penampilan daiyah cilik yang menyampaikan ceramah singkat. **(Afrial)**



Foto: Dok. Humas Setdako Banda Aceh
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman bersama-sama Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Arif Fadillah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh Media Yulizar melakukan pelepasan balon ke udara saat melakukan pencanangan Gampong Lampaloh sebagai Gampong Ramah Anak.

Jurus Jemput Bola Disdukcapil Kota



Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banda Aceh melakukan jemput bola untuk perekaman data e-KTP ke sejumlah sekolah

BANDA ACEH - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh dihadapkan dengan pekerjaan rumah berat. Dinas ini harus mempercepat perekaman Karti Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Apalagi, keberadaan e-KTP semakin penting dalam proses administrasi masyarakat. Terutama menjelang Pemilihan Umum 2019.

“Perekaman data harus segera dirampungkan bagi warga kota yang belum melakukannya. Dinas harus mencari solusi agar warga mudah merekam data mereka secara elektronik,” kata Kadisdukcapil Banda Aceh Emila Sovayana, Senin pekan lalu. Cara yang dilakukan oleh Dinas adalah dengan

“menjemput bola” langsung ke kantong-kantong warga.

Langkah ini tak lagi sulit dilakukan karena Dinas, kata Emila, menelurkan inovasi berupa layanan antrean berbasis *online*, pencatatan akta kelahiran secara *online*, pencatatan akta kematian secara *online*, program Pelayanan Langsung Jadi (Pelangi). Dan ini dilakukan dari gampong ke gampong.

Hingga September lalu, jumlah penduduk Banda Aceh tercatat 243.101 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 123.107 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 119.994 jiwa. Mereka yang wajib memiliki KTP sebanyak

167.019 jiwa dan yang melakukan perekaman sebanyak 154.106 jiwa. Sisanya, 12.913 jiwa belum terekam.

Menurut Emila, warga kota yang belum merekamkan data terhalang sejumlah alasan. Seperti baru memasuki usia 17 tahun, batas usia yang berhak mendapatkan kartu tanda penduduk. Ada juga yang sakit dan berada di luar kota. Untuk menjangkau penduduk muda, Disdukcapil mendatangi sekolah-sekolah.

Di sini, pelajar Sekolah Menengah Atas yang belum ber-eKTP

dapat merekamkan data mereka tanpa perlu kehilangan waktu belajar. Mereka, kata Emila, tak perlu meninggalkan areal sekolah menghabiskan waktu untuk mendatangi kantor pelayanan di Balai Kota. Prosesnya, kata Emila, juga mudah.

Sedangkan untuk warga yang sepuh, petugas Disdukcapil akan mendatangi kediaman mereka. Syaratnya, kata Emila, keluarga terdekat datang dan melaporkan keberadaan anggota keluarga lansia dan menyerahkan alamat lengkap untuk didatangi.

Disdukcapil juga rutin berkunjung



“Perekaman data harus segera dirampungkan bagi warga kota yang belum melakukannya. Dinas harus mencari solusi agar warga mudah merekam data mereka secara elektronik”

Emila Sovayana
Kadisdukcapil Kota Banda Aceh

ke rumah sakit jiwa, panti jompo dan gampong-gampong untuk menjangkau warga. Dinas juga melakukan terobosan dengan menandatangani kerja sama dengan lembaga lain. Satu di antaranya adalah Kepolisian Daerah Aceh. Ini adalah kerja sama untuk memverifikasi data kependudukan warga yang akan ingin direkrut sebagai anggota kepolisian.

“Kami juga melakukan jemput bola ke sekolah-sekolah, seperti PAUD, TK dan SD untuk percepatan pencatatan akta kelahiran dan konversi data akta manual ke SIAK serta program Pelangi ke gampong-gampong,” kata Emila. **(A.Sabur)**

Jangan Mangkir dari Uji Kir

BANDA ACEH - Sejumlah kendaraan barang dan bak terbuka berjejer di tepi Jalan Tgk Chik Pante Kulu. Petugas Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh terlihat memeriksa surat-surat dan kelengkapan kendaraan serta mencocokkannya dengan stiker yang terlampir di sisi kendaraan.

Rabu, akhir Oktober lalu, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menggelar razia dan menertibkan kendaraan bak terbuka yang biasa mangkal di jalan itu. Razia ini dilakukan bekerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. “Masih banyak pemilik mobil barang yang tidak mengindahkan aturan tentang KIR,” kata Kepala Dinas Perhubungan Muzakir Tulot.

Kir adalah pengujian kendaraan bermotor. Ini berasal dari Bahasa Belanda; *keur*. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kelayakan kendaraan dalam memenuhi spesifikasi. Pelaksana uji ini adalah Dinas Perhubungan. Sementara kendaraan yang harus menjalani uji adalah angkutan umum, kendaraan berplat kuning, atau kendaraan bak terbuka dan kabin ganda.

Kendaraan tak lolos uji tidak diperkenankan beroperasi. Pemilik atau pengemudi harus memperbaiki

kendaraan tersebut hingga layak berjalan. Pemeriksaan meliputi sistem pengereman, kondisi ban, wiper kaca depan, klakson, kaki kaki, serta cek emisi atau gas buang kendaraan. Uji juga meliputi pengecekan instrumen di *dashboard*. Petugas juga akan memeriksa lampu-lampu kendaraan dan mengecek performa mesin.

Jika dinyatakan lolos, petugas akan memberikan buku uji dan plat uji serta stiker uji *kir*. Sementara yang tak lolos, harus memperbaiki sejumlah kerusakan agar memenuhi spesifikasi untuk “melenggang” di atas aspal hitam. “Namun masih banyak kendaraan yang tidak menjalani uji kir. Padahal ini penting. Tidak hanya bagi pengguna jalan yang lain, uji ini juga penting bagi keselamatan pengemudi,” kata Muzakir.

Menurut Muzakir, kendaraan-kendaraan yang tidak menjalani uji secara berkala tidak terjamin keandalannya. Dan sebenarnya, kata Muzakir, uji kir ini penting juga dijalani oleh kendaraan pribadi atau kendaraan dinas. Dengan demikian, kelemahan dan kelemahan kendaraan, yang berkaitan langsung dengan keselamatan berkendara, dapat diperbaiki. Saat ini, Dinas Perhubungan Kota Banda



Muzakir Tulot
Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Aceh menekankan razia kepada kendaraan umum dan angkutan barang.

“Setiap bulan kita prioritaskan tiga kali razia, hampir semua kendaraan yang diberhentikan ada kekurangannya,” kata Muzakir. Dalam razia di Jalan Cik Pante Kulu itu, petugas mendapati banyak pengemudi yang tak memiliki surat izin mengemudi. Bahkan banyak kendaraan yang tidak memiliki surat tanda kendaraan bermotor dan kendaraan tidak layak angkut. Petugas pun mendapati kendaraan berplat hitam yang digunakan

untuk mengangkut penumpang. “Mereka langsung ditilang.”

Razia yang itu melibatkan 28 orang personil dari Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan dua anggota kepolisian dari Dirlantas Polda Aceh dan empat orang anggota Satlantas Polresta Banda Aceh. Sedikitnya 25 kendaraan terjaring. Kendaraan-kendaraan itu melanggar aturan tentang jenis mobil dan peruntukannya. Empat pengemudi didapati mengantongi SIM kadaluarsa dan 21 pelanggaran habis masa berlaku buku kir. **(A.Sabur)**

Karena Guru Juga Perlu Motivasi



BANDA ACEH - Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh Saminan, berpesan. Dia meminta guru meningkatkan motivasi dalam

mengajar. Hasrat mereka dalam mendidik sangat penting bagi keberhasilan program pendidikan.

“Saya berharap para guru di Banda Aceh mampu menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran

yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik,” kata Saminan dalam Pelatihan dan Pendidikan bagi guru Taman Kanak-kanak di wilayah

Banda Aceh, pertengahan Oktober lalu.

Menurut Aminullah, seperti dikutip Saminan, banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan profesionalisme guru. Banyak guru yang memiliki sertifikat, sebagai tanda lulus sertifikasi, namun tidak mempunyai jumlah jam mengajar yang cukup untuk bisa memperoleh tunjangan biaya sertifikasi.

Untuk mengantisipasi hal ini, reformasi birokrasi yang dilakukan harus difokuskan pada upaya mewujudkan sosok guru yang memiliki integritas tinggi, profesional, tangguh, memiliki nilai-nilai moral dan kejujuran serta memenuhi standar kompetensi yang dilandasi dengan iman dan takwa.

Sementara itu panitia pelaksana menyebutkan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini tindak lanjut UKG tahun 2015, yang pada tahun 2016 bernama Program Guru Pembelajar (GP). Muslim, Kepala Bidang PTK Disdikbud, berharap Program Pengembangan Keprofesian (PKB) atau sekarang disebut Pendidikan dan Pelatihan Guru (Diklat guru) memberikan capaian nilai UKG dengan rata-rata nilai nasional 75.

Semua guru yang telah mengikuti UKG ini sebanyak 524 peserta, dibagi dalam 14 pusat pembelajar dengan moda tatap muka in on in : 20.30.10 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kegiatan Instruksi Nasional (IN) sudah digelar sejak 9 Oktober 2018 dan berakhir pada 28 Oktober 2018.

“Untuk Uji Kompetensi Guru (UKG) dimulai pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2018 di Banda Aceh dengan instruktur nasional dari Kota Banda Aceh,” kata Muslim. **(A.Sabur)**

Meretas Jalan Syariah di Kota Zikir

BANDA ACEH - Berbagai anggapan melekat dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sebagian besar mendukung. Namun tak sedikit pula yang mencap negatif, terutama mereka yang berasal dari luar Aceh. Bahkan tak jarang, mereka mengampanyakan hal-hal buruk dan mengait-ngaitkan hal ini dengan pelanggaran hak asasi manusia.

“Itu semua anggapan keliru. Tidak benar anggapan syariat Islam di suatu daerah memberatkan daerah tersebut,” kata Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Ridwan Ibrahim, di Aula Dinas Syariat Islam, pertengahan Oktober lalu.

Syariat Islam, kata Ridwan, diturunkan Allah untuk manusia sebagai alat memudahkan hidup mereka. Bukan sebaliknya. Ajaran Islam menyelamatkan dan menyejahterakan umat manusia itu sendiri. Penerapan syariat Islam di Banda Aceh harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat dengan utuh agar tak ada kesalahpahaman.

“Yang mendapatkan manfaat dari pelaksanaan syariat Islam adalah masyarakat itu sendiri. Tentu masih banyak yang harus kita sempurnakan, namun jika pemahaman tentang pelaksanaan syariat Islam berkembang di masyarakat, pelaksanaannya akan menjadi lebih optimal,” kata Ridwan.

Untuk memaksimalkan pemahaman ini, Dinas Syariat Islam terus bersosialisasi.

Termasuk lewat jalur pendidikan. Tergetnya adalah para pelajar. Mereka, insan-insan muda, diharapkan mau memahami dan mengamalkan syariat Islam secara kaffah. Dengan demikian, kehidupan mereka akan menjadi lebih baik dan berkontribusi pada kehidupan sosial di Banda Aceh.

Agenda untuk pelajar ini digelar saban Jumat pagi. Tim DSI menjumpai para pelajar mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB. Dakwah berisi ajakan agar siswa mengembangkan semangat bersyariat Islam, memberikan pemahaman tentang seks bebas, LGBT (lesbian, guy, transgender, biseksual), bahaya narkoba dan penyimpangan lainnya.

Sejak 2016, kata Ridwan, Dinas Syariat Islam membekali ilmu agama kepada 37 ribu siswa di Banda Aceh. Ridwan berharap pelaksanaan syariat Islam dapat dijalankan secara utuh, sesuai dengan Alquran. “Jadi Alquran lah yang menjadi pangkal tolak dari segala pemahaman tentang syariat Islam. Kerangka dasar ajaran Islam adalah akidah, syar’iyah dan akhlak,” ujarnya.

Bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang bersumber pada tauhid, tambah Ridwan, adalah inti akidah yang kemudian melahirkan syar’iyah, sebagai jalan berupa ibadah dan muamalah, serta akhlak sebagai tingkah laku baik kepada Allah SWT maupun kepada makhluk



Ridwan Ibrahim

Kepala Bidang Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

ciptaan-Nya.

Dinas Syariat Islam (DSI) Kota Banda Aceh sendiri memiliki segudang aktifitas keagamaan dan agenda dalam melakukan pembinaan dan pembekalan syariat terhadap warga kota. Setiap malam Ahad, misalnya, DSI menggelar safari dakwah ke berbagai masjid di Banda Aceh. dan ini satu-satunya gerakan jamaah yang

dikelola oleh Pemerintah Kota Banda Aceh.

Selain bersafari dakwah, Dinas Syariat Islam juga melakukan agenda dakwah melalui zikir bersama yang selama ini dilakukan di Pendopo Wali Kota. Apalagi, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman berniat menjadikan Banda Aceh sebagai Kota Zikir. **(A.Sabur)**

Media Yulizar

Kepala Dinas P3AP2KB

Jangan Diamkan Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan

DINAS Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Banda Aceh dihadapkan dengan tugas berat. Tugas itu adalah menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tantangan yang paling berat adalah mengubah cara pandang masyarakat terhadap tindakan kekerasan itu sendiri. Belum lagi, banyak masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap anak dan perempuan, terutama kekerasan seksual masih dianggap sebagai aib.

Hal ini diperburuk dengan mudahnya masyarakat untuk mengakses situs-situs yang mengandung unsur pornografi. Akibatnya, go-daan untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama dan melanggar norma-norma itu semakin tinggi. Namun Media Yulizar, Kepala Dinas P3AP2KB, meyakini bahwa dengan komitmen bersama, hal ini dapat ditekan dan diatasi bersama. Berikut wawancara Info Banda Aceh dengan Media, beberapa waktu lalu, terkait upaya dinas untuk mengantisipasi hal ini.

Bagaimana Anda menyikapi isu kekerasan terhadap anak dan perempuan di Banda Aceh?

Harus ada upaya bersama untuk menghadapi permasalahan ini. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah permasalahan kita bersama. Ini menyangkut marwah kita sebagai masyarakat. Memberikan ruang terhadap kekerasan artinya kita menghancurkan masa depan bangsa.

Model kekerasan apa yang sering terjadi di Banda Aceh?

Tahun ini masih didominasi oleh kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, masih ada orangtua yang tidak mau melaporkan kejadian ini kepada kami atau pihak kepolisian karena

menganggap hal ini adalah aib keluarga. Perilaku ini yang harus kita ubah. Masyarakat tak boleh lagi mendiamkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Seberapa penting peran masyarakat dalam menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak?

Masyarakat memegang peranan penting dalam kampanye mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Apalagi, masyarakat Banda Aceh adalah masyarakat yang dekat satu dengan yang lain. Hal ini sebenarnya sangat memudahkan upaya kita meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan itu sendiri. Dan yang terpenting, masyarakat harus terlibat langsung mencegah kekerasan. Upaya pencegahan harus sama gencarnya dengan upaya penanganan, sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir.

Siapa saja pelaku kejahatan ini?

Kebanyakan orang-orang dekat. Atau orang yang pernah dekat. Bisa pacar, mantan pacar, dan suami. Ada juga paman atau kerabat lain, yang memiliki akses terhadap korban secara langsung.

Langkah apa yang dilakukan DP3AP2KB untuk memaksimalkan informasi?

Kami memanfaatkan penyebarluasan informasi melalui website dan sosial media. Mengenalkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Termasuk lewat media ini, *Info Banda Aceh*, dan media-media milik pemerintah kota. Kami berharap informasi itu dapat mendorong masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialami perempuan dan anak ke unit layanan P2TP2A. Dan selama ini, bentuk kekerasan itu semakin bervariasi. Karenanya, kami menghimbau semua pihak untuk

berkomitmen dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Baik itu dari kalangan pemerintahan, LSM, dunia usaha serta tak kalah pentingnya keterlibatan masyarakat.

Anda dan DP3AP2KB gencar mengampanyekan sikap antikekerasan terhadap anak dan perempuan, apa targetnya?

Di awal, kami ingin muncul keberanian di masyarakat, terutama korban dan keluarganya, untuk melaporkan kejahatan ini kepada petugas, baik di P2TP2A atau ke kepolisian. Keberanian ini penting. Kami ingin muncul rasa percaya terhadap pemerintah kota dan kepolisian. Artinya, korban dan keluarganya merasa aman dan percaya kepada P2TP2A dalam menindaklanjuti pengaduan itu.

Di samping itu, upaya pencegahan terjadinya kekerasan juga terus dilakukan, diantaranya dengan mengembangkan kebijakan kota layak anak yang melibatkan lintas sektor terkait dan semua elemen masyarakat. Diantaranya dengan mengembangkan kebijakan gampong ramah anak, gampong KB, gerakan perlindungan perempuan dan anak terpadu berbasis masyarakat (PPATBM), mendorong terciptanya ruang bermain ramah anak serta masih banyak lagi program dan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan mencegah terjadinya kekerasan.

Apakah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini berkembang?

Trend-nya berubah, seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini. Pelaku biasanya menjadikan perempuan sebagai objek pornografi dan menyebarkan ke media sosial. Ada juga ancaman untuk menyebarkan foto-foto yang bersifat pribadi. Biasanya ini terjadi saat perempuan ingin meninggalkan pacarnya atau suaminya. Ada juga pengiriman teks berisi kata-kata jorok atau foto alat kelamin.

Apa langkah yang dilakukan pemerintah terhadap korban kekerasan model ini?

P2TP2A memberikan layanan dalam bentuk konseling (psikologis), konsultasi hukum, memfasilitasi dan memediasi penyelesaian kasus, pendampingan hukum, memberikan layanan pemulihan melalui program support grup serta mengupayakan program pemberdayaan dengan mengembalikan rasa percaya diri korban untuk siap kembali ke lingkungannya. (*)

